

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PPKM BERBASIS MIKRO DI
KELURAHAN TLOGOMAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik



OLEH :

SITI KHAIRUNNISA H

NIM 2017210147

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2021**

RINGKASAN

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dibuat karena kurang efektifnya kebijakan sebelumnya dalam penanganan Virus Covid-19 yaitu Kebijakan PPKM tahap I dan II. Kebijakan PPKM berbasis Mikro ini merupakan upaya menekan penyebaran Virus Covid-19 dengan lebih efektif dengan pendekatan yang lebih mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan PPKM berbasis Mikro di Kelurahan Tlogomas untuk menekan bertambahnya kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi George Edward III dengan merumuskan empat faktor yang menjadi syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan lisan dari informan yang dipilih yang diyakini paling memahami terkait implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas yaitu Kepala Kelurahan Tlogomas, anggota Satgas Covid-19 Kelurahan Tlogomas, Ketua Posko PPKM Mikro tingkat RT dan RW Kelurahan Tlogomas, serta masyarakat Kelurahan Tlogomas dan pengamatan di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Waktu penelitian yang dilakukan yaitu selama tujuh hari. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan PPKM berbasis Mikro pada Kelurahan Tlogomas yaitu sudah baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya sumber daya finansial. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro namun hal tersebut dapat segera diatasi.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM Mikro, Pandemi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pada penghujung tahun 2019 lalu hampir seluruh Negara di dunia digemparkan dengan wabah penyakit menular yang mematikan yang berasal dari salah satu kota di Cina. Virus atau penyakit ini menyerang sistem pernapasan dan imun tubuh manusia sehingga dapat membunuh manusia. Berdasarkan penelitian Virus ini bersumber dari hewan dan dapat menyebar dengan sangat cepat melalui udara. Dalam waktu yang sangat singkat virus yang disebut *Corona Virus Disease* 2019 tersebut menyebar hampir ke seluruh Negara di dunia salah satunya Negara Indonesia. Terdapat lebih dari 213 negara di dunia yang telah melaporkan *Corona Virus Disease* 2019.

Dihitung sejak awal masuknya virus ini ke Indonesia hingga saat ini dilaporkan bahwa telah lebih dari ratusan ribu masyarakat Indonesia yang telah terinfeksi. Sebagian besar pasien yang terinfeksi tersebut akhirnya meninggal dunia. Keadaan ini memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang. Dari bidang ekonomi, pendidikan, pariwisata, social-budaya, dan terutama pada bidang kesehatan. Tentunya keadaan ini membuat pemerintah harus segera melakukan penanganan untuk menanggulangi penyebaran Virus tersebut dengan melihat semakin bertambahnya korban dan masih banyak masyarakat yang berjuang melawan virus tersebut.

Berdasarkan panduan WHO (*World Health Organization*) dalam merespon kondisi ini, yaitu memutuskan rantai penyebaran Covid-19 dengan tidak keluar rumah, mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin dan beberapa panduan lainnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan. Protokol kesehatan adalah ketentuan yang wajib diikuti oleh semua pihak untuk dapat beraktivitas dengan aman di masa pandemi ini. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur.

Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 yang membahas hal terkait guna menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi ini dibuat dengan melihat belum maksimalnya pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Penerapan protokol kesehatan di masyarakat dinilai belum maksimal sehingga perlu adanya aturan tambahan. Adanya instruksi tersebut maka Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang kebijakan terkait.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Kota Malang kembali meningkatkan disiplin protokol kesehatan mengingat Kota Malang termasuk dalam wilayah zona merah yang mana penduduk yang terinfeksi Covid-19 bertambah secara signifikan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Sebagaimana dilihat dari hasil selama penerapan protokol kesehatan di Kota Malang, masih sekitar 60% sisanya masyarakat masih tidak disiplin dalam melaksanakan Protokol Kesehatan.

Khususnya di Kecamatan Lowokwaru sebanyak 12 orang diamankan oleh petugas gabungan yang melaksanakan Operasi Yustisi penggunaan masker I wilayah Lowokwaru. Hal ini membuat kasus Covid-19 di Kota Malang semakin bertambah. Merujuk data Pemkot Malang, ada 273 kasus konfirmasi Covid-19 yang dalam pemantauan. Sebanyak 32 kasus di Kecamatan Kedung Kandang, 52 kasus di Sukun, 73 kasus di Blimbing, 49 kasus di Klojen, dan 67 kasus di Lowokwaru. (Bisnis.com)

Oleh karenanya adanya peraturan ini adalah bagian dari usaha pemerintah guna menegakan kedisiplinan warga dalam melaksanakan protokol kesehatan. Langkah ini termasuk menerapkan sanksi-sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Ini demi menekan bertambahnya kasus Covid-19 di Kota Malang.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Virus tersebut, mulai dari PSBB, kebijakan New Normal, PPKM hingga kebijakan terkait Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, namun belum dapat diatasi dengan baik. Sehingga dikeluarkan lagi kebijakan PPKM berbasis Mikro dalam peraturan terbaru oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Inmendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan. Melalui instruksi ini Gubernur Jawa Timur membuat Keputusan Gubernur Nomor

188/58/KPTS/013/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro. Demikian di tingkat Kota, Wali Kota Malang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan.

Surat Edaran ini mengatur bagaimana prioritas utama di setiap wilayah Kelurahan hingga RT/RW dalam pembentukan posko penanganan Covid-19. Untuk pembentukan posko di koordinasi melalui kecamatan dan Tim Satgas Covid-19. Dalam PPKM Mikro ini juga diatur tentang pembentukan posko penanganan Covid-19 melalui koordinasi antara semua unsur yang terlibat, Kebijakan ini dikeluarkan setelah PPKM tahap I dan II yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM berbasis Mikro Hingga saat ini Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro masih terus diperpanjang melihat kondisi Kota Malang saat ini masih belum stabil. Dimana mana sekarang sudah memasuki tahap ke-4 yang akan terus diperpanjang hingga keadaan pulih dan sesuai dengan instruksi dari Pemerintahan Pusat.

Sesuai dengan Instruksi Kementerian Dalam Negeri, Malang menjadi satu kawasan yang wajib menerapkan PPKM Mikro karena masuk dalam Zona Merah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Penerapan kebijakan PPKM Mikro di Kota Malang, di Kota Malang terdapat 12 Kelurahan yang menjadi skala prioritas. Di mana 12 Kelurahan tersebut masuk dalam kategori Zona Merah dan Zona Orange. Salah satu dari 12 Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Tlogomas. Kelurahan Tlogomas masuk dalam kategori Zona Merah sehingga Kelurahan Tlogomas menjadi prioritas pelaksanaan kebijakan PPKM berbasis Mikro.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan tentu akan ada permasalahan yang terjadi. Ini dapat dilihat berdasarkan kendala dalam pencapaian tujuannya. Dalam menerapkan kebijakan PPKM berbasis Mikro guna mengurangi kasus Covid-19 di Kelurahan Tlogomas masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti, ketidakpatuhan masyarakat Kelurahan Tlogomas dalam pembatasan kegiatan khususnya di tempat umum seperti pasar, warung makan, kafe atau warung kopi dan masih ada masyarakat yang belum melakukan protokol secara baik dan tepat. Setelah meninjau kendala yang ada pada Kelurahan Tlogomas dalam implementasi Kebijakan PPKM Mikro, maka perlu ditinjau sejauh mana implementasi kebijakan tersebut dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM Mikro di Kelurahan Tlogomas.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Kiranya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam implementasi kebijakan PPKM Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adiwidjaja, Ignatius. 2017. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Zahir: Pablising
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Moleng, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Miles, Huberman dan Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Arizona State University.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media CV Citra Intrans Selaras.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret Surakarta; University Press. Surakarta
- Widodo, Joko 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Press.

E-Journal

- Nawang Sari, Ertien Rining, dkk. 2021. Partisipasi Masyarakat Kelurahan Jelakombo terhadap PPKM Skala Mikro di Kabupaten Jombang. *Jurnal Syntax Transformation*. 2(5):593-605.
- Napitu, Ulung, Corry dan Marhaeni K.D.Matondang. 2021. Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal*. 2(2):232-241.
- Listyaningrum, Novia dan Rinda Philona. 2021. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Masa Pandemi. ISSN. 15(7):2-11.
- Pinasti, Faura Dea Ayu. 2020. Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness and Healthy Magazine*. 2(2):237-249.

Skripsi

Beni, Benivansius. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang: Malang

Peraturan Perundang-Undangan:

UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Intrusi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corono Virus Disease* 2019.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/58/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Surat Edaran Wali Kota Malang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Internet

Astuti, Indriyani. 2020. UU ini Acuan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pilkada. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/346754/uu-ini-acuan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-saat-pilkada> (diakses tanggal 10 Januari 2021)

KOMINFO JATIM. 2020. Sosialisasi Pergub 53 Tahun 2020 Diperpanjang Hingga 20 September. [Http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sosialisasi-pergub-53-tahun-2020-diperpanjang-hingga-20-september](http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sosialisasi-pergub-53-tahun-2020-diperpanjang-hingga-20-september) (diakses tanggal 21 Januari 2021)

Bisnis.com. 2020. Sepekan Corona Kota Malang, Laju Positif Lebih Kencang. <Hhps://m.bisnis.com/Surabaya> (Diakses tanggal 10 Februari 2021).

SURYAMALANG.com. 2021. Daftar Kelurahan yang Masuk Skala Prioritas Penerapan PPKM Mikro di Kota Malang. <https://suryamalang.tribunnews.com/2021>. (Diakses tanggal 20 April 2021)